



# Tinjauan perspektif ekologi politik: Persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan wisata premium di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo

ELRIN MEIVIAN MONGI<sup>1</sup>, FADHILA AFIFAH<sup>1</sup>, RACHMA FAUZIAH<sup>1</sup>, SEMUEL RAHALLUS<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Kota Malang, Jawa Timur, 65148, Indonesia;

\*Korespondensi: elrinmongi@gmail.com

Diterima: 27 Desember 2023

Direvisi Akhir: 30 Januari 2024

Disetujui: 22 Februari 2024

## ABSTRAK

**Pendahuluan:** Komodo (*Varanus komodoensis*) merupakan hewan reptil yang dilindungi yang ditemukan di Taman Nasional Komodo (TNK). Kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. TNK saat ini direncanakan oleh pemerintah menjadi Geopark wisata super premium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut dan apakah terdapat dampak terhadap kapital alam di wilayah Taman Nasional Komodo akibat dari pembangunan tersebut. **Hasil dan Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pembangunan ini belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam penyusunan. Terdapat kekhawatiran yang dirasakan masyarakat lokal akan persaingan ekonomi dengan adanya rencana pembangunan wisata premium serta kekhawatiran yang dirasakan masyarakat lokal akan adanya degradasi lingkungan dan akan ancaman kepunahan komodo.

**KATA KUNCI:** ekologi; masyarakat; politik; wisata.

## ABSTRACT

**Introduction:** The Komodo dragon (*Varanus komodoensis*) is a protected reptilian species found in the Komodo National Park (KNP). The Komodo National Park and its surrounding areas are among the National Strategic Areas (NSAs) listed in Government Regulation No. 13 of 2017 concerning the National Spatial Planning Plan. The KNP is currently planned by the government to become a super premium tourist Geopark. This research aims to understand the local community's perceptions of the development plan and whether there are impacts on natural capital in the Komodo National Park area as a result of this development. **Result and Conclusion:** Based on the research findings, it is found that this development has not fully involved the local community in its formulation. There are concerns among the local community regarding economic competition due to the planned development of premium tourism and concerns about environmental degradation and the threat of Komodo dragon extinction.

**KEYWORDS:** ecology; community; politics; tourism.

## Cara Pengutipan:

Mongi, E. M., Afifah, F., Fauziah, R., & Rahallus, S. (2024). Tinjauan perspektif ekologi politik: Persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan wisata premium di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo. *Ecotourism and Environment Conservation*, 1(1), 9-22. <https://doi.org/10.61511/ecotour.v1i1.2024.673>

**Copyright:** © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



## 1. Pendahuluan

Komodo merupakan salah satu reptil langka yang dilindungi yang hanya dapat ditemukan di dalam Taman Nasional Komodo dan di utara pulau Flores (Santosa et al., 2012). Komodo dengan nama latin *Varanus komodoensis* merupakan hewan peninggalan purba dan mendapat gelar tujuh keajaiban baru dimana hewan ini dikonservasi di Taman Nasional Komodo (TNK). TNK ini merupakan konservasi fauna endemik Indonesia yang sangat populer di kancah nasional dan internasional, serta sebagai destinasi wisata prioritas kelas dunia (Hidayat, Rachmad, 2009).

Kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya memang memiliki nilai strategis yang tinggi, baik dari segi ekonomi maupun perlindungan keanekaragaman hayati. Penetapan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan potensi kawasan tersebut dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional dan perlindungan lingkungan. Pengelolaan kawasan ini sebagai bagian dari Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu (ICZM) sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang baik antara pembangunan dan pelestarian. Pentingnya informasi dasar dalam proses penataan dan pengelolaan kawasan pantai dan pesisir mencakup pemahaman yang holistik terhadap kondisi alam, keanekaragaman hayati, serta aspek-aspek sosial budaya. Data ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang tepat dan efektif dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut. Sebagai bagian dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya Taman Nasional Komodo, perlu adanya langkah-langkah konkret seperti pengawasan terhadap aktivitas manusia, penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Semoga upaya pengelolaan dan pelestarian kawasan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat, ekonomi nasional, dan kelestarian alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah menjelaskan bahwa ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam. Namun, disamping dari pembangunan ekowisata ini, manusia harus memahami bagaimana satwa liar yang terancam dapat hidup berdampingan dengan manusia dalam jangka panjang. Hal ini merupakan isu utama dalam konservasi dan pengelolaan satwa liar (Ardiantiono, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan Geopark Taman Nasional Komodo dan apakah terdapat dampak terhadap kapital alam di wilayah Taman Nasional Komodo akibat dari pembangunan Geopark. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam mengembangkan sektor ekowisata dan mendorong pemerintah untuk lebih mendukung berkembangnya ekowisata.

## 2. Metode

### 2.1 Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 dan *Focus Group Discussion* dilakukan secara daring melalui media Zoom dengan masyarakat lokal pada tanggal 7 Januari 2021.

Tabel 1. Profil narasumber

Nama	Status/Pekerjaan	Usia (tahun)
Aksan	Kepala Desa Komodo	>50
Ismail	Sekretaris Desa Komodo	39
Haji Kasing	Tokoh Masyarakat	50
Haji Majid	Pemilik UKM Kuliner	>50
Bidong	Tokoh Pemuda Desa Komodo & <i>Tour Guide</i>	42
Asdar	Sekretaris Karang Taruna Desa Komodo & <i>Tour Guide</i>	28

## 2.2 Analisis Data

Data yang diambil pada penelitian ini dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* dan wawancara secara mendalam dengan masyarakat lokal Pulau Komodo. Hasil dari FGD akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif pada hasil dan pembahasan.



Gambar 1. Poster FGD yang dilakukan bersama masyarakat lokal yang dilakukan secara daring melalui Zoom

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Nilai penting dan strategis Taman Nasional Komodo

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan dalam memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Salah satu destinasi wisata yang saat ini banyak diminati oleh wisatawan adalah Destinasi Wisata Pulau Komodo yang merupakan salah satu potensi wisata andalan di Kota Labuan Bajo (H. Idris et al., 2019).

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK) memberikan berbagai dampak bagi masyarakat setempat. Hasil analisis SEM terhadap tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat

yang berkelanjutan di TNK dalam jangka panjang dapat ditingkatkan lebih dari dua persen, jika semua pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk meningkatkan kondisi pariwisata pedesaan. lapangan kerja, kegiatan pariwisata bisnis lokal, jumlah alternatif mata pencaharian dan pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan per kapita paling sedikit satu persen. Bersama dengan itu, program kesadaran konservasi, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, kursus pelatihan tentang warisan budaya lokal bagi pegawai pariwisata, informasi tentang protokol sosial desa; dan pameran seni budaya, dapat meningkatkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan (Benu, Muskanan & King, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2011 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menjelaskan bahwa kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) TN Komodo mencakup wilayah perairan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah daratan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Kawasan TN Komodo.

Kegiatan bernilai penting dan strategis nasional/obyek vital nasional adalah kawasan/ lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Berdasarkan hasil penelitian Suraji et al. (2020), Kondisi dan potensi sumberdaya alam kawasan strategis nasional kawasan Taman Nasional Komodo yang meliputi Keadaan Oseanografi, Potensi Ekosistem Pesisir, Potensi Daerah Penangkapan Ikan, Potensi Daerah Tujuan Wisata Selam, Kawasan Konservasi dan Biota Dilindungi, Daerah Rawan Tsunami, dan Kegiatan Pemanfaatan Perairan Pesisir memiliki nilai penting dan strategis dalam tata kelola kawasan strategis nasional yang dapat dirumuskan dalam perencanaan ruang laut dalam menjawab keberlanjutan fungsi konservasi dan keanekaragaman hayati Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pengambilan keputusan bersama antar pemangku kepentingan terhadap hasil analisis kesesuaian dan analisis skoring terhadap kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional yang memiliki bobot sangat penting (7-9) dapat digunakan untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang dalam menetapkan rencana alokasi ruang laut dengan tetap memperhatikan kepentingan strategis nasional. Rencana alokasi ruang laut di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan TN Komodo, terdiri atas: (1). Kawasan Pemanfaatan Umum, terdiri dari Zona Pariwisata, Zona Pelabuhan, Zona Pelabuhan Perikanan, dan Zona Pengelolaan Energi; (2). Kawasan Konservasi yang berupa Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Taman Nasional Komodo yang merupakan inti dari KSN Taman Nasional Komodo, dan; (3) Alur Laut.

Analisis Nilai Penting dan Strategis Nasional yang telah dilakukan menghasilkan Perencanaan Ruang Laut yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Komodo dan konservasi perairan; dan kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan sumber daya kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 3.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pembangunan Geopark di Taman Nasional Komodo

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat lokal adalah orang yang benar-benar paham kondisi desa mereka. Sehingga masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pengembangan. Partisipasi masyarakat ini juga sejalan dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat lokal, dimana CBT mampu memberikan manfaat bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan pekerjaan sehingga perekonomian masyarakat lokal dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait sejauh mana pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan TNK sebagai berikut.

*“Ketika kebijakan itu menjurus kepada kepentingan masyarakat, masyarakat pasti berpartisipasi dan mendukung. Sementara masyarakat sendiri dalam kebijakan konservasi taman nasional, masyarakat selalu terlibat dalam aksi apapun yang dicanangkan oleh taman nasional dan pemerintah, misal dalam hal kebakaran, perburuan liar, dll. Namun sayangnya saat pembuatannya kebijakan, pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat. Setelah kebijakan itu nanti diaduk, setelah itu nanti mendapatkan satu kesepakatan dari mereka, baru mereka (pembuat kebijakan) turun ke masyarakat menyampaikan apa yang mereka rencanakan. Tapi mereka menyampaikan itu setelah semua kebijakan itu real dan sudah jadi. Masyarakat tidak bisa apa-apa, mau menyampaikan aspirasi namun di sana (pembuat kebijakan) kebijakan sudah real dan fix. Harapan kami masyarakat, kebijakan mempertimbangkan hak masyarakat, sebelum kebijakan itu diturunkan pemerintah harus duduk bersama masyarakat. Sehingga tahu kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan itu nanti tidak ada pro kontra. Begitu juga saat ini terkait pembangunan wisata premium komodo, kami masih menunggu hingga saat ini untuk dilibatkan. Tapi jika nanti kebijakan itu keluar dan kami melihat lebih mendukung para investor maka terus terang kami pantang mundur untuk mempertahankan wilayah kami”. (Ismail, 7 Januari 2021)*

*“Sementara waktu, keterlibatan masyarakat sebenarnya turut ambil andil dalam kebijakan-kebijakan. Masyarakat ikut berpartisipasi dan turun tangan mendukung kebijakan itu sepanjang kebijakannya punya dampak positif kepada masyarakat. Tapi, terkadang kebijakan pemerintah itu seperti tidak menghiraukan masyarakat. Itulah sebabnya mengapa masyarakat sedikit kesal terhadap pemerintah. Sementara, masyarakat sangat mendukung konservasi, baik itu (pengendalian) kebakaran, dsb. Masyarakat itu turut ambil andil. Tetapi sayang, kebijakan itu sekarang mengabaikan hak-hak masyarakat. Setelah itu diaduk (proses) dan menghasilkan suatu kesepakatan dari mereka (Pemerintah), baru MEREKA datang ke masyarakat menyampaikan rencana mereka. Bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kalau di sananya sudah real dan fix. Banyak sih kebijakan pemerintah yang mengabaikan hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, harapan kami (tokoh masyarakat dan perangkat desa) agar pemerintah sebelum membuat kebijakan ya minimal harus duduk bersama dulu dengan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu mana yang mendukung dengan masyarakat dan mana yang tidak (bagian mana yang positif dampaknya bagi masyarakat dan yang tidak). Jadi tidak ada pro dan kontra dengan masyarakat nantinya. Seharusnya ada sosialisasi dulu tentang apa yang akan direncanakan. Kami menunggu saja sekarang bagaimana wisata premium itu nantinya. Selama itu bermanfaat untuk masyarakat akan kami dukung. Tetapi jika ternyata wisata ini hanya menguntungkan investor saja, maka kami pantang mundur untuk mempertahankan wilayah kami”. (Ismail, 7 Januari 2021)*

### *3.3 Kebijakan pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo*

Hasil dari FGD yang disampaikan Bapak Ismail selaku narasumber yang berprofesi sebagai sekretaris desa, warga dan perangkat desa belum mendapatkan kebijakan yang jelas tentang adanya pembangunan *geopark* ini. Narasumber mengatakan bahwa selama pembangunan akan menguntungkan warganya, maka warga dan perangkat desa menyetujui adanya pembangunan wisata premium ini. Persetujuan perangkat desa menggunakan syarat ramah lingkungan dan tidak mengancam keberadaan satwa komodo. Narasumber juga mengatakan bahwa harapan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warganya yang masih jauh dari layak dari adanya rencana pembangunan wisata premium ini. Pembangunan wisata premium ini tentunya harus melalui kontrol yang baik dan sesuai dengan aturan pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

### 3.4 Kondisi dan keberadaan komodo di Taman Nasional Komodo

Menurut Mustari et al. (2010) yang melakukan riset bersumber pada Petugas TNK yang bertugas di Pulau Padar sejak TNK dibentuk pertama kali tahun 1980, komodo dapat dijumpai secara langsung. Pada tahun 1990-an hanya kotoran dan jejak kaki komodo yang dapat ditemukan. Pada tahun 1992 Team TNK melakukan inventarisasi populasi rusa di Pulau Padar, tetapi tidak menemukan sama sekali komodo. Pada tahun ini tercatat 60 ekor rusa berdasarkan perjumpaan langsung di Pulau Padar. Pada tahun 2001 Baik langsung maupun jejak (kaki dan kotoran) komodo tidak dijumpai lagi. Pada tahun ini juga ditemukan 3 ekor rusa yang mati, akan tetapi bangkai rusa tetap utuh, tidak ada yang memangsa atau tanda - tanda adanya pemangsaan. Pada tahun ini juga Tim peneliti dari San Diego Zoo memasang perangkap di Pulau Padar yang dirancang khusus untuk komodo, namun tidak ada komodo yang terperangkap. Pada tahun 2004 baik langsung, maupun tidak langsung, satwa komodo di Pulau Padar tidak dijumpai lagi, dimana pada tahun itu ditemukan 8 ekor rusa yang mati, tidak ada yang memangsa, sebagaimana yang lazim terjadi di pulau lain yang dihuni komodo seperti di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pada November 2006 dilakukan penelitian oleh IPB dan Team Penelitian TNK, Tidak ditemukan komodo baik langsung maupun jejak baik kotoran, kaki, maupun tulang belulang di Pulau Padar.

### 3.5 Ancaman degradasi lingkungan di marginalisasi masyarakat lokal

Desa Komodo merupakan salah satu desa dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Desa ini terletak di Pulau Komodo dan menjadi bagian dalam pengelolaan TNK. Desa ini berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Desa Komodo sebagai desa yang berada di Pulau Komodo merupakan desa yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan ekowisata di Pulau Komodo. Mayoritas masyarakat Desa Komodo secara turun-temurun merupakan nelayan JUMPA Volume 2 Nomor 1 Juli 2015 3 Partisipasi Masyarakat Desa Komodo dalam Pengembangan Ekowisata di Pulau Komodo tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut TNK (Renstra BTNK 2010-2014). Sejalan dengan semakin berkembangnya ekowisata di Pulau Komodo, masyarakat Desa Komodo kini mulai beralih profesi ke sektor ekowisata.

Pengelolaan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo didominasi oleh Petugas TNK, sedangkan masyarakat setempat secara eksklusif diposisikan sebagai pemandu wisata alam. Disamping itu penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pariwisata di taman nasional hanya berdampak pada masyarakat yang tinggal di kawasan pulau Komodo sehingga masyarakat yang tinggal di pulau Rinca tidak dapat sejahtera dan sejahtera (Kodir, et al., 2019).

Arti Komodo di beberapa narasumber

*"Terlepas dari apa yang orang pahami dari konsep konservasi. Ya karena kami menganggap Komodo itu bagian dari saudara kami yang perlu kami jaga dan perlu kami lindungi. Kita harus lihat dulu punahnya disebabkan karena apa. Apakah punah karena (faktor) alam, karena kebijakan pemerintah, atau karena apa. Tapi jika punah karena misalnya kebijakan pemerintah dengan membangun bangunan beton dan semen yang bisa mengganggu habitat Komodo, ya jelas kami akan menuntut itu. Karena kami cinta terhadap Komodo dan kami telah menganggapnya sebagai saudara kami. Kami merasa kehilangan yang sangat besar"* (Ismail, 7 Januari 2021)

Peran pemuada terhadap budaya dan konservasi Komodo

*"Bahwa pemuda melihat ini masyarakat sudah mendiami desa komodo, tentu ini menjadi hal yang fundamental. Untuk budaya sendiri pemuda memiliki pemahaman bahwa budaya ini harus dilestarikan, salah satunya adalah dengan membuat komunitas, agar budaya dapat dikemas dengan baik sebagai potensi wisata yang baik. Pembangunan desa sampai sekarang masih kurang, pembangunan hanya dilakukan di kawasan wisata"* (Bidong, 7 Januari 2021)  
*"Kita sangat khawatir terhadap budaya (kami). Budaya Desa Komodo, jika dilihat dari sejarah kami sebenarnya punya budaya yang unik. Penduduk Ata Modo sudah mendiami wilayah ini bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat dulu berpindah-pindah*

hingga kemudian menetap di Desa Komodo ini. Dulunya masyarakat bertani dan melaut hingga sekarang beralih ke pariwisata. Kita tentu punya kesenian budaya seperti tarian, dsb yang perlu dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Kami sudah menggagas agar potensi yang kita miliki ini bisa dikemas sebaik mungkin sebagai komoditas wisata. Harapannya, tak hanya komodo yang menjadi atraksi, tapi juga budaya kami dan ini akan membantu melestarikannya. Kami berusaha menyusun sebuah buku yang menceritakan sejarah Desa Komodo. Wisata premium sebenarnya bisa menjadi benteng kami. Manfaat wisata premium semestinya bisa dinikmati oleh semua, tidak hanya pemda. Saat ini, pembangunan infrastruktur dipusatkan di Labuan Bajo. Ini berat sebelah. Pembangunan di desa-desa lain dalam kawasan tidak terlalu dirasakan. Contohnya, pengembangan dermaga untuk wisata premium hanya fokus pada komodo. Seharusnya masyarakat dalam kawasan itu juga harus dikembangkan dan diberikan fasilitas dan pelayanan publik. Seharusnya potensi-potensi lain selain Komodo dapat turut dikembangkan. Terkait pengembangan infrastruktur pariwisata premium seperti resort, dsb. Menurut saya pasti akan sedikit mengganggu aktivitas masyarakat yang masih berprofesi sebagai nelayan. Nantinya pasti akan ada pembatasan-pembatasan selain pembatasan zonasi yang sudah ada sebelumnya. Kami memang sudah membentuk tim terpadu yang akan melihat isu ini. Jika tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, maka kami akan menuntut itu” (Asdar, 7 Januari 2021)

Selain itu ada ancaman lain yang terjadi akibat dari pembangunan wisata, yaitu aliran air. Menurut para informan, untuk akses air ini masyarakat harus bergilir tiap tiga hari sekali satu kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 20 kepala keluarga. Air tersebut berasal dari air yang dikelola oleh desa. Hingga saat ini belum ada kebijakan atau solusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat terhadap kondisi kesulitan air yang terjadi di Pulau Komodo. Pemerintah dalam upaya rencana pembangunan Geopark TNK ini perlu adanya rencana matang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa narasumber menyatakan bahwa kurang adanya partisipasi dari pemerintah. “Kalau kita yang punya bisnis kuliner atau souvenir, kami belum mendapat bimbingan dari pemerintah terkait dengan pelatihan memasak dan segala macamnya, Mungkin ini juga yang membuat kuliner-kuliner kita di sana (Loh Liang) kurang dilirik oleh pengunjung. Pertama, terkait dengan fasilitas yang ada mungkin kurang begitu bagus, Karena di sana hampir tidak ada tempat penyimpanan seperti etalase, kemudian kursi-kursinya masih semrawut, lalu ibu-ibu di sana juga tahunya memasak mie, telur. jadi tamu-tamu kurang berminat, Belum ada bimbingan dan harapan kami mungkin pemerintah pusat bisa melihat keadaan yang dirasakan di wilayah kami” (Haji Majid)

Hasil dari FGD yang disampaikan oleh Bapak Bidong selaku masyarakat lokal yang berprofesi sebagai *tour guide*, terdapat kekhawatiran akan ancaman lingkungan bagi komodo dan ancaman persaingan secara ekonomi. Ancaman persaingan secara ekonomi telah dijelaskan secara jelas oleh narasumber, bahwa masyarakat lokal yang minim akan skill dan pengetahuan akan dihadapkan dengan persaingan mega proyek pembangunan wisata premium tersebut. Responden mengatakan bahwa rencana pembangunan diperkirakan memiliki tiket masuk \$1000. Selain tiket masuk yang mahal, pengunjung direncanakan akan dibatasi. Dengan adanya rencana aturan ini, responden mengkhawatirkan adanya persaingan dari *tour guide* serta penjual souvenir dan penjual makanan yang akan bersaing dengan rekanan dari proyek wisata premium. Responden sanksi bahwa masyarakat lokal bisa bersaing dengan rekanan dari mega proyek wisata alam tersebut dikarenakan dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kodir et al. (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo didominasi oleh Petugas TNK, sedangkan masyarakat setempat secara eksklusif diposisikan sebagai pemandu wisata alam. Disamping itu penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pariwisata di taman nasional hanya berdampak pada masyarakat yang tinggal di kawasan pulau Komodo sehingga masyarakat yang tinggal di pulau Rinca tidak dapat sejahtera dan sejahtera (Kodir et al., 2019).

Pembangunan wisata premium dikhawatirkan akan mengancam keberadaan satwa komodo. Menurut narasumber Bapak Bidong, komodo merupakan satwa yang telah ada

sejak lama dan memiliki habitat alam asli yang sesuai untuk habitat tinggal komodo. Jika pembangunan wisata premium dilakukan, dikhawatirkan akan merusak habitat alam komodo dan merusak habitat yang menjadi tempat tinggal mangsa komodo. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Mustari et al. (2010) yang menyatakan bahwa habitat yang terdapat di pulau Padar merupakan asosiasi dan memiliki keterikatan dengan komodo, sehingga habitat-habitat di pulau tersebut harus dilestarikan sehingga rantai dan jaring-jaring makanan tetap terjaga dengan baik, dan populasi komodo akan tetap lestari.

### 3.6. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan geopark

Perkembangan pariwisata yang sangat pesat hanya dapat dihadapi secara interdisipliner pendekatan. Namun, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Herbig et al. (2019) menyatakan bahwa tim yang terlibat dalam proyek perencanaan wisata berkelanjutan hanya terdiri dari perencana, arsitek dan antropolog sosial dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan disiplin ilmu yang lebih luas mencakup berbagai aspek serta pendekatan solusi berkelanjutan tentang perencanaan kota dan wilayah, pengembangan pariwisata, *eco-labeling*, dll. Domain antropologi budaya dan sosial juga informatika lingkungan harus dipahami sebagai kunci untuk menghubungkan berbagai disiplin ilmu yang akan terlibat dalam proyek yang sedang berlangsung. Hal yang paling penting lainnya adalah keterlibatan penduduk lokal tidak hanya sebagai tenaga kerja tetapi sebagai penggerak dan kekuatan pembentuk untuk memastikan implementasi yang cepat dan kelanjutan yang berkelanjutan (Herbig et al., 2019).

Berdasarkan penelitian dari Ziku (2015) menyatakan bahwa terdapat hasil yang positif dalam partisipasi masyarakat pada pengembangan ekowisata terhadap ekonomi, lingkungan serta sosial budaya. Partisipasi ini merupakan tahap pelaksanaan dimana adanya pelibatan seseorang pada suatu proyek dimana masyarakat dapat memberikan tenaga, uang hingga material/ barang serta ide-ide sebagai wujud partisipasi (Ziku, 2015). Namun berdasarkan hasil dari wawancara terhadap narasumber menyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan *Geopark* di dalam TNK belum ada upaya dalam melibatkan masyarakat pada proyek ini.

Situasi yang Anda gambarkan menunjukkan kompleksitas antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Pulau Komodo. Konflik antara kebutuhan konservasi dan kebutuhan ekonomi sering kali menjadi tantangan di banyak kawasan yang memiliki nilai ekologi tinggi. Beberapa langkah mungkin dapat diambil untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian alam dan keberlanjutan ekonomi:

- a. Partisipasi Masyarakat  
Libatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo. Berikan mereka suara dalam menentukan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
- b. Pendekatan Berbasis Masyarakat  
Implementasikan program pengembangan ekonomi berbasis masyarakat yang memungkinkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti ekowisata lokal atau produksi kerajinan tangan tradisional.
- c. Pendidikan dan Pelatihan  
Berikan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan keterampilan alternatif yang dapat meningkatkan peluang kerja di luar sektor perikanan, seperti pariwisata, pertanian berkelanjutan, atau pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.
- d. Perencanaan Zonasi yang Fleksibel  
Pertimbangkan untuk mengembangkan zonasi yang lebih fleksibel, memungkinkan beberapa daerah di sekitar Taman Nasional untuk digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal, dengan pembatasan yang diatur secara ketat untuk melindungi area kritis.

- e. Kerjasama antara Pihak Pemerintah dan Swasta:  
Mendorong investasi swasta yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di kawasan tersebut, yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan.
- f. Monitoring dan Evaluasi Terus-Menerus  
Lakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap dampak kebijakan konservasi terhadap kehidupan masyarakat lokal. Sesuaikan kebijakan jika ditemukan dampak yang merugikan.
- g. Pengembangan Ekowisata  
Fokus pada pengembangan ekowisata yang dapat menghasilkan pendapatan sambil tetap menjaga kelestarian alam. Pergeseran ke sektor ini dapat memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan.

*“Sejak tahun 1969, Pulau Komodo dan Pulau Padar ditunjuk sebagai Hutan Wisata melalui SK Gubernur KDH 1 NTT No. 32 Tahun 1969. Kemudian, tahun 1977 PBB menetapkan Pulau Komodo sebagai cagar biosfer. Lalu, tahun 1980 pemerintah menetapkan Pulau Komodo sebagai Taman Nasional Komodo. Pada saat itu, masyarakat masih banyak yang berkebun, terutama di daerah Loh Liang yang menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk melihat Komodo. Pada saat itu, kehidupan masyarakat Pulau Komodo sangat bergantung dari hasil perkebunan dan perikanan (nelayan). Pariwisata masih awam sekali di telinga kami. Kemudian, ada satu Lembaga swasta yang dilibatkan dalam pengelolaan TN Komodo dan mereka menetapkan zonasi-zonasi yang menentukan wilayah yang diperbolehkan bagi masyarakat Komodo untuk melakukan aktivitasnya. Atas kebijakan itu, masyarakat lokal tidak bertahan dan kemudian beralih profesi menjadi pramuwisata, tour guide, penjual souvenir, dsb. Sekarang, ada kebijakan baru mengenai wisata super premium. Sampai saat ini kami belum paham karena belum mendapatkan penjelasan detail mengenai apa itu Wisata super premium karena belum ada sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kami ingin menanyakan sebenarnya, posisi masyarakat (lokal) dimana? apakah kami sebagai subjek atau hanya objek saja? Kemudian, ada beberapa investor yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan pembangunan seperti di Rinca, menurut kami pemerintah hanya berpikir dari aspek ekonominya saja, tetapi tidak memikirkan aspek konservasi, yaitu kelangsungan hidup Komodo itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan seberapa besar kah urgensinya untuk membangun bangunan sebesar dan semegah itu? Tidak memikirkan dampak bagi Komodo itu sendiri. Kami khawatir bahwa dengan adanya pembangunan ini akan berdampak bagi Komodo.*

*Jika kita berbicara mengenai pariwisata dan konservasi, ini adalah dua hal yang kontradiktif dan tidak akan saling bertemu. Karena saya pernah mendengar dari salah satu media bahwa pemerintah geopark untuk kenyamanan para pengunjung. Berarti pemerintah hanya memikirkan kenyamanan pengunjung, tetapi tidak memikirkan tentang Komodo. Makanya saya ingin bertanya seberapa urgent kah geopark yang dibangun seperti Jurassic Park itu? Kemudian apakah ada riset atau survei yang menunjukkan adanya ancaman dari Komodo terhadap pengunjung wisata sehingga muncul ide pembangunan itu? Kami sangat menginginkan konservasi harus tetap diutamakan. Kami bukannya anti terhadap perubahan, tetapi kami menginginkan perubahan yang tanpa mengabaikan konservasi itu sendiri..Hak dasar hidup kami yang tinggal di dalam kawasan taman nasional. Lalu, mengenai wisata premium... Saya agak 'ini' ya... karena misalnya seperti yang akan dibangun di Pulau Komodo itu, katanya tarifnya akan dinaikkan menjadi 1000 dolar per orang. Sedangkan, saat ini 60-70% masyarakat Komodo kehidupannya sangat bergantung pada pariwisata. Ada yang menjadi nature guide, ada juga yang menjual souvenir, dan mereka aktivitasnya terpusat di Loh Liang sebagai pintu masuk wisata Komodo. Logikanya gini, kalau nanti tarifnya 1000 dolar, otomatis jumlah kunjungan akan menurun karena yang bisa berkunjung hanya orang-orang tertentu saja. Bisa saja mungkin yang tadinya ada 1000 orang malah bisa hanya 100 saja yang berkunjung. Yang 1000 orang saja belum tentu mereka belanja semua (souvenir,, kuliner, dll), apalagi nanti menjadi 100 orang. Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Lalu, kami dengar di Rinca akan dibangun stand UMKM. Ini artinya nanti akan terjadi persaingan. Kami dihadapkan pada pemodal-pemodal besar. Kami tidak mungkinlah bisa bersaing*

dengan pemodal-pemodal besar. Hemat saya, di sini ada niat terselubung. Jangan-jangan nanti masyarakat lokal akan digusur secara perlahan. Oleh sebab itu, kami berharap rencana pemerintah untuk mengembangkan wisata eksklusif di Pulau Komodo harus dikaji ulang” (Haji Bidong, 7 Januari 2021)

“Tadi sudah dikatakan oleh pak Bidong sebelum nya adanya wisata premium aja di taman nasional ini sampai sekarang kami belum tahu batas batas zona itu seperti apa, sekarang masih dipertanyakan kan kadang-kadang masyarakat sendiri yang dulunya itu mayoritasnya pekerjaan mereka menjadi nelayan tetapi dengan adanya pariwisata sehingga beralih profesi ke penjualan souvenir, tetapi kenyataan selama ini kami sendiri masyarakat yang ada di pesisir kepulauan khusus yang ada dalam Taman Nasional Komodo sangat mendukung itu, tapi selama ini dukungan kami itu percuma, ternyata dukungan kami itu hanya sebatas dukungan, tetapi feedback yang untuk merasakan sendiri itu tidak ada sama sekali, justru di situ ada intimidasi ada penekanan terhadap masyarakat sendiri. contohnya saya tanya ke masyarakat yang ingin melaut, ternyata setelahnya nanti masyarakat melaut di sana ada tekanan bahwa ini zona inti, bahwa ini zona rimba segala macam, jadi masyarakat nggak tahu, yang masyarakat tahu cari uang untuk hidupi anak istri itu lah yang pertama. Terus yang kedua dari hasil Taman Nasional Komodo, dari Komodo dikelola oleh pihak Balai Taman Nasional dari 1982 hingga setelah Komodo termasuk dalam Taman Nasional, Tokoh-tokoh kami pernah ajukan kontribusi distribusi dari daerah itu dari pemerintah pusat Provinsi kontribusinya untuk masyarakat Komodo apa dari hasil pengelolaan selama 1 tahun itu, itu tidak ada sama sekali sementara masyarakat Komodo sekarang minta dukungannya untuk mendukung wisata premium, tetapi pemerintah tidak pernah memikirkan fisik dari itu apa? Indonesia sekarang sudah merdeka 73 tahun, Malam ini saya nyatakan bahwa masyarakat itu belum merdeka. Kenapa? karena mereka masih terpuruk, Iya mereka masih terpuruk sekarang contohnya dari fasilitas umum sarana prasarana khususnya dermaga sampai sekarang Pak itu, sampai sekarang kami sepertinya kayak pengemis, kami jadi pengemis di rumah kami sendiri Kalau kami pikirkan bahwa Taman Nasional itu masuk setelah masyarakat Komodo mendiami Pulau Komodo itu lebih awal terus orang Komodo bukan Taman Nasional. Taman Nasional masuk itu setelah masyarakat Komodo ada di sana tapi sepertinya belum ada baiknya untuk masyarakat, bahkan dermaga kalau bapak ada waktu silakan tinjau, pembangunan apa yang dibuat oleh Taman Nasional, apa yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau bisa terus terang, dari Taman Nasional saja kami sudah sengsara, apalagi sampai masalah Komodo nantinya. Seperti yang dikatakan oleh pak Bidong benar sekali apalagi sampai di sana nanti ada UMKM, segala macam persaingan ekonomi masyarakat di sana bagaimana, yang jelas masyarakat nanti sudah terpinggirkan, apalagi di sana masalah keterbatasan ekonomi apa segala macam itu perlu dipertimbangkan semua, padahal sekarang Labuan Bajo sudah mau masuk wisata premium, tapi aku kasihan sayang masih ada dalam kawasan Taman Nasional yang hasil pengurangan negatif dari Desa Komodo sendiri itu sampai sekarang tidak ada apa-apanya begitu. Jadi untuk wisata premium yang berdampak sosial itu seperti itu pak. Kemarin di desa komodo di Pulau Komodo ada Sail Komodo , tetapi kemarin justru masyarakat tidak dipakai jasanya mereka tidak dihadirkan untuk festival itu tapi dipergunakan dari masyarakat lain, Jadi kami juga sampai sekarang masih pertanyakan kenapa sampai kemudian dipinggirkan, sementara Komodo itu lahir dari Pulau Komodo begitu kan Pak jadi perlu dipertimbangkan” (Ismail, 7 Januari 2020)

### 3.7. Politik ekologi wisata premium menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup komodo

Paul Robbins (2004) memberikan pandangan bahwa politik-ekologi merupakan suatu pandangan yang multi tafsir. Hal ini dapat dilihat dari luasnya konsep-konsep dan definisi yang digunakan. Mulai dari konsep “*ueco-lobby*”*ecology*”, “*political-economy*”, “*distribution of power*”, “*bio-environmental relationship*”, “*the political consequences of environmental change*”, hingga “*access and control over resources*”. Dari setiap definisi yang ada dapat diambil kata-kata kunci lainnya yang dianggap penting oleh masing-masing pembaca. Namun beberapa kata kunci yang dipaparkan di atas, selain memperlihatkan kompleksitas

terminologi ekologi politik, juga ingin menunjukkan bahwa terminologi ekologi politik dalam derajat tertentu bukanlah suatu konsep yang baru.

Sedangkan Peluso (1992), melihat ekologi politik mengacu pada analisis ekonomi politik lingkungan yang terkait dengan beberapa diskusi perihal pengguna sumber daya alam dan kaitannya dengan proses yang lebih luas dari struktur lingkungan sosial dan fisik dimana tindakan itu berlangsung. Bagi Peluso, ekologi politik lebih menyerupai sebuah metode analisis daripada sebuah teori per-se. Ia bahkan memberikan persamaan antara ekologi politik dengan *progressive contextualization*, sebuah pendekatan yang sering diterapkan oleh ahli ekologi manusia untuk menganalisis dan memberikan jawaban mengenai kebijakan lingkungan yang relevan. Namun demikian, selain terjadinya titik singgung antara *progressive contextualization* dan ekologi politik, terdapat juga perbedaan yang mendasar. Kedua pendekatan ini melihat siapa pengguna langsung sumber daya (*direct resources users*) dan melihat pentingnya konteks yang mengatur seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap pemanfaatan sumber daya tertentu.

Sedangkan Zingerli (2005: 735) memberikan beberapa penjelasan singkat mengenai beberapa pendekatan dalam ekologi politik, seperti struktural dan pasca struktural. Dalam pendekatan *post-structural*- dengan mengutip pendapat sarjana lainnya dilihat sebagai pendekatan yang memberi fokus pada aspek sejarah dan pengaruh kebudayaan. Kemudian dalam tulisannya ia lebih menggunakan pendekatan sejarah dan *actor oriented*. Dengan demikian, suatu pendekatan ekologi politik dapat dianggap sebagai pendekatan yang melihat posisi dan peran aktor dalam menggunakan sumber dayanya, dan kemudian bagaimana institusi yang bersifat lokal, nasional dan internasional mempengaruhi. Saya mengikuti pendapat yang melihat politik-ekologi sebagai sebuah alat analisis untuk melihat situasi lokal yang dikaitkan dengan dimensi nasional dan bahkan global, serta melihat pentingnya faktor kesejarahan. Oleh sebab itu, dalam analisis wacana terhadap keberadaan pengelolaan taman nasional, perlu untuk melihat para aktor yang bermain pada tingkat lokal, kemudian melihat relasinya dalam konteks nasional, serta bagaimana pengaruh global memasuki ranah lokal dan nasional. Dimensi sejarah menjadi faktor penting untuk melihat bagaimana sebuah institusi bekerja pada situasi kekinian.

Hasil FGD yang dilakukan oleh narasumber Bapak Bidong menyatakan bahwa adanya kekhawatiran terhadap ancaman kelangsungan hidup komodo. Kekhawatiran ini dilandaskan bahwa perubahan lingkungan dengan adanya proyek wisata premium akan mengubah habitat asli dan mengurangi tumbuhan-tumbuhan lokal. Tumbuhan-tumbuhan lokal yang merupakan makanan bagi rusa timor dan babi hutan, akan berdampak pada penurunan satwa-satwa liar apabila tumbuhan-tumbuhan tersebut berkurang. Sedangkan rusa timor dan babi hutan merupakan mangsa bagi komodo. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Mustari et al. (2010) yang menyatakan bahwa habitat-habitat di pulau Padar memiliki keterkaitan dengan komodo karena di dalamnya terdapat jaring-jaring makanan yang saling terkait satu sama lain. Apabila habitat terganggu, salah satu jenis dari rantai makanan akan hilang dan mengganggu jaring-jaring makanan. Apabila terjadi ketidakseimbangan pada jaring-jaring makanan, maka akan terjadi kepunahan dalam salah satu spesies di jaring-jaring makanan tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti dua perhatian utama yang dirasakan oleh masyarakat lokal terkait dengan rencana pembangunan wisata premium. Pertama, masyarakat merasa khawatir akan dampak persaingan ekonomi yang dapat timbul akibat kehadiran wisata premium tersebut. Kekhawatiran ini muncul karena adanya potensi penggeseran peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal. Kedua, masyarakat juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan degradasi lingkungan dan ancaman kepunahan komodo, sebagai aset lingkungan dan simbol keberagaman biologis yang penting di wilayah tersebut. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dan pelestarian spesies menjadi fokus penting dalam pengembangan dan pengelolaan wisata di daerah

tersebut, yang perlu diakomodasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan wisata berkelanjutan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah mendukung penulisan penelitian ini

### **Kontribusi Penulis**

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini

### **Pendanaan**

Penelitian ini tidak menggunakan pendanaan eksternal.

### **Pernyataan Dewan Peninjau Etis**

Tidak berlaku.

### **Pernyataan *Informed Consent***

Tidak berlaku.

### **Pernyataan Ketersediaan Data**

Tidak berlaku.

### **Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

### **Akses Terbuka**

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### **Daftar Pustaka**

- Ardiantiono, Jessop, T. S., Purwandana, D., Ciofi, C., Jeri Imansyah, M., Panggur, M. R., & Ariefiandy, A. (2018). Effects of human activities on Komodo dragons in Komodo National Park. *Biodiversity and Conservation*, 27(13), 3329-3347. <https://doi.org/10.1007/s10531-018-1601-3>
- Ariefiandy, A., Purwandana, D., Natali, C., Imansyah, M. J., Surahman, M., Jessop, T. S., & Ciofi, C. (2015). Conservation of Komodo dragons *Varanus komodoensis* in the Wae Wuul nature reserve, Flores, Indonesia: A multidisciplinary approach. *International Zoo*

- Yearbook*, 49(1), 67–80. <https://doi.org/10.1111/izy.12072>
- Bennett, N. J., Roth, R., Klain, S. C., Chan, K., Christie, P., Clark, D. A., ... & Wyborn, C. (2017). Conservation social science: Understanding and integrating human dimensions to improve conservation. *biological conservation*, 205, 93-108. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.10.006>
- Fred, B. E. N. U., Muskanan, M. W., & WULAKADA, H. H. (2020). Community participation and sustainable tourism development model in Komodo National Park. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11(2), 250-262. [https://doi.org/10.14505//jemt.v11.2\(42\).03](https://doi.org/10.14505//jemt.v11.2(42).03)
- Bryant. L. Raymon. and Sinead Bailey (2000) *Third world Political Ecology*. Routledge. london and New York.
- H. Idris, M., Va, S., & Destari, R. (2019). Pengaruh Destinasi Pariwisata Pulau Komodo Terhadap Beberapa Aspek Pembangunan Di Kabupaten Manggarai Barat. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 56. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.776>
- Herbig, U., Valent, K. M., Pont, U., & Mahdavi, A. (2019). *Conserving the Paradise: Toward Hidayat, Rachmad (2019) KONEKTIVITAS TATAKELOLA "TAMAN NASIONAL KOMODO" BERCIRI KEPULAUAN PADA KONSERVASI FAUNA ASLI INDONESIA. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.*
- Kodir, A., Tanjung, A., Sumarmi, Ahmad, R., & Simanjuntak, T. B. (2019). Tourism governance in komodo national park, Indonesia: Blessing or curse? *Geojournal of Tourism and Geosites*, 27(4), 1401–1417. <https://doi.org/https://doi.org/10.30892/gtg.27424-44>
- Ziku, R. M. (2015). Partisipasi masyarakat Desa Komodo dalam pengembangan ekowisata di Pulau Komodo. *Jurnal Master Pariwisata*, 2(1), 1-21. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2015.v02.i01.p01>
- Mustari, Abdul Haris, et al. (2010). Ecological study and status of komodo population *Varanus komodoensis* on Padar Island, Komodo National Park. *Media Konservasi* 15(1), April 2010: 13 – 20
- Purwandana, D., Ariefiandy, A., Imansyah, M. J., Rudiharto, H., Seno, A., Ciofi, C., ... & Jessop, T. S. (2014). Demographic status of Komodo dragons populations in Komodo National Park. *Biological Conservation*, 171, 29-35. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.01.017>
- Robbins P. (2004) *Political Ecology: Critical Introductions to Geography*. Blackwell Publishing. Oxford.
- Santosa, Y., Muhammad, R. Y. Z., & Rahman, D. A. (2012). Pendugaan parameter demografi dan bentuk sebaran spasial biawak komodo di pulau rinca, taman nasional komodo. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 17(2), 126-131. <https://jurnalpenyuluhan.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/view/8328/6503>
- Sunkar, A., Kusriani, M. D., & Ramadhani, F. S. (2020). Role of culture in the emotional response towards komodo dragon in Komodo and Rinca Islands of Komodo National Park. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 19, p. 00021). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20201900021>
- Suraji, S., Hasan, S., Suharyanto, S., Yonvitner, Y., Koeshendrajana, S., Prasetyo, D. E., Widiyanto, A., & Dermawan, A. (2020). Nilai Penting dan Strategis Nasional Rencana Zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 15(1), 15. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v15i1.8888>
- Sustainable Touristic Development in the Westmanggarai, Indonesia. *Applied Mechanics and Materials*, 887, 282–291. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.887.282>
- Sutomo, S. (2020). Vegetation Composition of Savanna Ecosystem as a Habitat For The Komodo Dragon ( *Varanus komodoensis*) on Padar and Komodo Islands, Flores East Nusa Tenggara Indonesia. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.22146/jtbb.48280>
- Ziku, R. M. (2015). Partisipasi Masyarakat Desa Komodo dalam Pengembangan Ekowisata di Pulau Komodo. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2015.v02.i01.p0>

**Biografi Penulis**

**ELRIN MEIVIAN MONGI**, Program Studi Magister, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: elrinmongi@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

**FADHILA AFIFAH**, Program Studi Magister, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: -
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

**RACHMA FAUZIAH**, Program Studi Magister, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: -
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

**SEMUEL RAHALLUS**, Program Studi Magister, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: -
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

**Biografi Penulis**

**NELI ANDINI**, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang .

- Email: roniabk@unikama.ac.id
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -